

**WOLIO, BUTON, ATAU BAUBAU SEBAGAI WACANA NAMA KOTA
BAUBAU (IDENTITAS DAN TRANSFORMASI NILAI BUDAYA
KESULTANAN BUTON)**

*WOLIO, BUTON, OR BAUBAU AS DISCOURSE OF THE BAUBAU CITY NAME
(IDENTITY AND CULTURAL VALUE TRANSFORMATION OF BUTON
SULTANATE)*

Tasrifin Tahara

Departemen Antropologi FISIP UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar, 90245
Telepon/Faks (0411) 585024
Email: tasrifin.tahara@yahoo.co.id

Syamsul Bahri

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km. 7 Makassar, 90221
Telepon (0411) 885119, 883748, Faksimile (0411) 865166
Pos-el: syamsul.bahri@yahoo.com

ABSTRACT

This article discusses the naming identity legitimacy of the Baubau City. Embedding the name of the Baubau City recently arises of the discourse when it becomes a new autonomous area. There are three names to be referenced, namely Wolio, Baubau, and Buton. The Wolio name is a transformation of a sub-ethnic group which becomes the ruler during the Buton Sultanate. The Buton name as a nation entity of a sultanate whose territory centered in the Baubau City nowadays. While, Baubau is a new area in the Buton Sultanate Central area which is the focus of the economy. The method used of the research is qualitative descriptive using documentation, interview, and observation. The results show that the naming of the Baubau City upon three choices of Wolio, Baubau, and Buton is an articulation or transformation of the Buton Sultanate periode through now as an identity of the Baubau City based on ethnicity and the past territory.

Keywords: *Baubau City, name, and transformation*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang legitimasi identitas penamaan Kota Baubau. Penyematan nama Kota Baubau saat ini muncul dari wacana ketika menjadi sebagai sebuah daerah otonom baru. Ada tiga nama yang menjadi wacana, yakni Wolio, Baubau, dan Buton. Nama Wolio merupakan transformasi dari kelompok sub etnik yang menjadi penguasa masa Kesultanan Buton. Nama Buton sebagai entitas bangsa sebuah kesultanan yang wilayahnya berpusat di Kota Baubau saat ini. Sedangkan Baubau merupakan suatu wilayah baru di Wilayah Pusat Kesultanan Buton yang menjadi pusat perekonomian. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana penamaan Kota Baubau dari tiga pilihan Wolio, Baubau, dan Buton merupakan artikulasi sebuah atau transformasi dari masa Kesultanan Buton hingga saat ini sebagai identitas Kota Baubau berbasis etnik dan wilayah masa lalu.

Kata kunci: *Kota Baubau, Nama dan Transformasi*

PENDAHULUAN

Orang Buton adalah kelompok etnik yang memiliki mobilitas tinggi dan salah satu etnik yang melakukan diaspora di seluruh nusantara selain suku Bugis-Makassar (BBM). Konon dimana ada wilayah pantai, di situ pula orang Buton menambatkan perahu untuk mempertahankan hidup. Tak jarang, ketika di berbagai wilayah di nusantara tidak susah menemukan orang Buton. Salah satu tempat yang sangat gampang menemukan orang Buton adalah di pasar dan wilayah pesisir. Orang-orang Buton ketika datang, mereka membuka kebun di bukit-bukit di belakang pesisir orang Ambon, tetapi tidak diperkenankan memiliki tanah pertanian. Mereka lebih banyak bekerja sebagai pembuat makanan dan buruh di kota. Oleh karena itu, orang Buton pada umumnya berpendidikan lebih rendah, dan bersedia melakukan pekerjaan yang dianggap rendah oleh orang Ambon.

Dalam banyak literatur tentang orang Buton di Kepulauan Maluku (Lihat Chauvel, 1990; Palmer, 2002; Winn, 2008) Orang Buton tidak terlibat dan tidak mempunyai pengaruh pada politik daerah. Bahkan dianggap mempunyai status rendah daripada orang Ambon atau selalu disematkan *stereotype* atas orang Binongko ketika mereka berinteraksi dengan kelompok lain di perantauan. Namun dalam beberapa sisi positif, orang Buton digambarkan sebagai pekerja keras, pintar berdagang, dan tidak boros. Orang Buton menjelaskan bahwa mereka keluar dari kehidupan yang sulit di Buton dan bersedia bekerja apapun untuk menyambung hidup di Maluku. Namun dengan usaha yang keras, saat ini banyak orang Buton sukses di perantauan sebagai pelaku ekonomi dan mendapat posisi penting dalam politik seperti di Kabupaten Sula sebagai bupati dan di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Wakil bupati.

Namun dimana pun mereka berada, identitas “kebutonan” tetap dipegang teguh meski mereka sudah tidak pernah menginjakkan kaki di Pulau Buton dan bahkan mereka sudah generasi keempat dari nenek moyangnya yang Buton. Pengalaman saya ketika melakukan penelitian di Kepulauan Maluku dan Papua, hampir ketika saya bertanya tentang asal

usul, selalu muncul jawaban, “*saya dari Buton*”, selanjutnya ketika walaupun setelah saya bertanya ulang lebih spesifik kampungnya di Buton, biasanya mereka mengatakan: “*saya Buton Muna, saya Buton Ciacia, saya Buton Kulisusu*, dan sebagainya. Pernyataan-pernyataan seperti ini nampaknya sederhana, namun “memori kolektif” mereka atas kebesaran Kesultanan Buton sebagaimana tuturan leluhur mereka sangat tertanam dalam kepribadian orang Buton di perantauan.

Di sisi lain, beberapa peristiwa yang saya alami di perantauan ketika mendengar nama kabupaten/kota yang terdapat dalam wilayah eks Kesultanan Buton seperti Wakatobi, Bombana, dan Baubau yang “seolah-olah” nama tersebut sudah menjauh dari memori kesejarahan. Apakah penamaan ini berdasarkan berlandaskan akar *cultural* wilayah tersebut, atau bentuk resistensi atas dominasi masa lalu. Padahal sejarah masa lalu, mencerminkan kebesaran sebuah kelompok masyarakat, selalu memiliki arti yang penting bagi masa kini – terutama bagi anggota masyarakat yang merasa menjadi pemilik dan penerus sejarah masa lalu itu. Orang Buton beruntung memiliki sejarah yang bisa memberikan legitimasi historis akan sebuah wilayah geografis yang pernah terintegrasikan dalam bentuk kesultanan.

Selama ini dalam berbagai studi, penelitian tentang Buton satu masyarakat yang multikultur yang dimapankan dalam ideologi kekuasaan (*kaomu, walaka* dan *papara*) dan melalui sejarah. Tambahan pula selama ini Buton dikenal sebagai sebuah negara maritim dengan sistem pelapisan sosial (Rudyansyah, 1999; 2009; Tahara, 2014; Zuhdi, 2010)

Artikel ini adalah upaya merangkum dan mengkaji bagaimana pengalaman-pengalaman serta tafsir mereka pada sejarah tentang penamaan Kota Baubau dilihat dalam ideologi kekuasaan dan wilayah sebagai transformasi dari sistem Kesultanan Buton hingga saat ini sebagai daerah otonomi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian *deskriptif kualitatif* dengan lokasi penelitian di Kota Baubau

sebagai bekas Kesultanan Buton. Dalam mendukung penelitian ini, maka jenis data yang dikumpulkan lebih mengandalkan kualitas data. Data kuantitatif diperlukan sepanjang berguna dan relevan dengan pokok penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dengan informan dan observasi terhadap obyek penelitian, dan dokumen atau arsip-arsip kuno. Analisis data dilakukan dengan tiga langkah, yakni pengolahan data, reduksi data, penyajian dalam bentuk deskripsi dan penjelasan/penafsiran, dan penarikan kesimpulan penelitian.

PEMBAHASAN

Wolio: *Centrum Peradaban*

Konon diakhir abad ke-13 mendarat di daratan Pulau Buton empat orang pendatang dari Melayu yang membawa peradaban penting bagi masyarakat sebagai cikal bakal terbentuknya Kerajaan Buton. Keempat orang ini di kenal dengan sebutan *mia patamiana* yakni Sipajonga dan Sijawangkti serta Simalui dan Sitamanajo yang datang secara bertahap di Pulau Buton. Rombongan pertama Sipajonga dan Simalui mendarat di Pantai Sulaa yang terletak di Pantai Selatan Pulau Buton. Kedatangan rombongan tersebut membawa bendera warna-warni (*longa-longa*), yang konon dijadikan sebagai bendera kerajaan yang disebut "tombi pagi". Sedang wilayah tempat pemasangan bendera disebut Sulaa yang berarti "memasang bendera".

Rombongan kedua Sitamanajo dan Sijawangkti yang mendarat pantai timur agak ke utara yakni di Welalogusi atau sekarang dalam wilayah Kecamatan Kapontori yang kemudian terus berpindah pada bagian selatan yang akhirnya tiba di daerah yang dikenal dengan Kota Baubau. Kedua kelompok ini yang hanya dipisahkan oleh sungai ini akhirnya bersatu di Kalampa. Pemukiman di Kalampa ini tidak berlangsung lama karena adanya gangguan bajak laut yang mengakibatkan mereka pindah ke arah perbukitan yang disebut Wolio yang menjadi pusat Kerajaan Buton.

Kerajaan Buton pada awalnya merupakan afiliasi atau penyatuan empat kampung yang dikenal dengan istilah *pata limbona*. Secara etimologi *pata* dalam Bahasa Wolio berarti

empat, sedangkan *limbo* dalam Bahasa Wolio berarti kampung, *na* mengandung arti kepunyaan. Keempat kampung tersebut yakni Kampung Baluwu, Kampung Peropa, Kampung Gundu-gundu, dan Kampung Barakatopa. Berdasarkan hasil permufakatan dari para kepala kampung (*bonto*) tersebut, kemudian mereka mendirikan Kerajaan Buton, bersepakat menobatkan Putri Wa Kaa kaa yang konon berasal dari Negeri Cina sebagai raja pertama Kerajaan Buton.

Istilah Wolio juga bisa dikategorikan sebagai sub etnik dari Buton sebagai kelompok sosial yang memegang peranan penting dalam kesultanan, kemudian Wolio juga sebagai wilayah pusat kesultanan, dan Wolio juga bisa dikategorikan sebagai kelompok sosial penutur bahasa.



Gambar 1. Peta Benteng Wolio

Orang-orang memberikan gagasan yang berbeda-beda tentang asal usul kata "Wolio". Beberapa menyatakan bahwa kata "Wolio" berasal dari kata kerja "welia" yang berarti "menebas hutan/semak". Mereka menghubungkan kata kerja "welia" ini dengan aktivitas yang pertama kali dilakukan oleh leluhur mereka, ketika membuka hutan untuk tempat pemukiman mereka di masa lampau. Pemukiman inilah yang kemudian berkembang menjadi pusat dari kerajaan Wolio. Beberapa yang lain mengkaitkan kata "wolio" dengan kata "wali-ullah" yang berarti "wali Allah". Beberapa yang lain lagi menghubungkan kata "wolio" dengan "waliyu" yang merupakan satu kerajaan di

dalam Kecamatan Lasalimu yang dianggap sudah ada jauh sebelum Kerajaan Wolio lahir. Terlepas dari berbagai macam pengertian mengenai etimologi kata ini, "Wolio" sekarang dipahami sebagai nama dari kelompok sosial yang merupakan dua kelompok penguasa di dalam masyarakat ini, yakni *kaomu* dan *walaka*. Kata ini juga digunakan untuk mengacu nama dari bahasa yang mereka gunakan. Kata "Wolio" ini juga dipakai sebagai nama dari kesultanan, yakni Kesultanan Wolio, yang mencakup juga kelompok sosial yang bukan merupakan orang Wolio ke dalam wilayah kesultanan ini. Pada akhirnya, Bahasa Wolio juga berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam kesultanan ini yang mengakomodasi bahasa-bahasa dalam wilayah Kesultanan Buton.

Masyarakat Buton oleh Rudyansjah (2009: 8) didefinisikan ke dalam orang Wolio dan bukan-Wolio. Dua kategori sosial yang pertama, yakni *Kaomu* dan *Walaka*, termasuk ke dalam kategori orang Wolio. Sebaliknya dua kategori sosial yang terakhir, yakni *papara* dan *batua*, termasuk ke dalam kategori bukan orang Wolio¹. Wolio merupakan *centrum* bagi kebudayaan Buton secara luas sebagai bekas pusat Kesultanan Buton memiliki arti simbolis yang sangat penting bagi masyarakat Buton dan sekitarnya. Sebagai sebuah pusat kekuasaan telah menjadi peletak dasar struktur kekuasaan yang kuat dan mendorong terbentuknya pemukiman penduduk untuk menetap dalam kawasan tersebut.

Memahami nilai yang tentang Wolio tidak hanya dilihat dalam konteks kebendaan tapi dilihat secara holistik, baik kesejarahan, material, aspek sosial budaya masyarakat yang menjadi pewaris kebudayaan ini. Sebagai sebuah negara, simbol-simbol dan aspek kehidupan melekat pada masyarakat Buton. Dalam adat istiadat kesultanan (*Sarana Wolio*, harfiah "undang-undang" Wolio) apa yang dinamai Wolio didalamnya mengandung tiga pengertian, yakni perahu, Benteng Keraton, dan Mesjid (*Sara Kidina*) yang berada di dalam wilayah Benteng Wolio Buton.

Paling tidak terdapat empat simbol yang dapat memberikan legitimasi kekuasaan bagi Wolio sebagai simbol kebesaran di Pulau Buton. Simbol yang pertama adalah bekas keraton dan sisa-sisa reruntuhan bentengnya. Kedua adalah bangunan mesjid dan seluruh tradisi dan upacara-upacara keagamaan yang sampai sekarang masih dijunjung tinggi oleh para pengasuh dan warga Buton pada umumnya. Simbol ketiga adalah bangunan makam sultan dan keturunannya beserta silsilah yang sangat lengkap dari awal berdirinya sampai hari ini. Simbol keempat adalah museum Wolio dan segenap isinya yang mencerminkan berbagai lambang kebesaran Kesultanan Buton dan keluarganya.

Buton: Sejarah yang Terabaikan

Dari manakah asal kata Buton? Menurut Anna Tsing (1993: 85), biasanya pertanyaan ini adalah awal untuk memulai sebuah etnografi. Buton adalah nama pulau yang di sebelah tenggara jazirah Pulau Sulawesi. Namun sesungguhnya, nama Buton telah sedikit disinggung dalam sumpah Patih Gajah Mada pada tahun 1364, sebagaimana tertera dalam Kitab *Negarakertagama* pupuh ke-14 yang ditulis oleh Mpu Prapanca yang menyatakan bahwa Buton (Kerajaan Buton) termasuk dalam pengawasan Kerajaan Majapahit. Pulau ini diapit oleh lautan yaitu Laut Banda di sebelah utara dan timur, kemudian Laut Flores di sebelah selatannya, sedangkan di sebelah barat terdapat Selat Buton dan Teluk Bone. Rabani (2010: 67) menuliskan bahwa salah satu kota pantai yang berkembang di Sulawesi Tenggara adalah Kota Buton. Kota ini pada awalnya terpusat di kompleks Keraton (Wolio). Kota ini terletak dalam wilayah kekuasaan sebuah kerajaan atau kesultanan yang bernama Buton atau Wolio. Daerah kekuasaan Kesultanan Buton pernah meliputi, selain Pulau Buton, juga beberapa pulau di kawasan antara Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Pusat pemerintahannya terletak di pesisir barat bagian selatan Pulau Buton, sekitar Kota Baubau, yang dikenal dengan nama Wolio atau Keraton Buton.

Selama ini ini, nama Buton dikenal sebagai pulau yang dikenal di nusantara dan

¹Penjelasan mengenai *kaomu*, *walaka*, *papara* dan *batua* bisa dilihat Rudyansjah, 1997; Schrool, 2003; Tahara, 2014

berbagai mancanegara sebagai pulau penghasil aspal. Secara harfiah, 'Buton' memiliki banyak arti. *Pertama* dalam konteks geografis, 'Buton' berarti 'Pulau Buton' yang terletak di ujung semenanjung Sulawesi Tenggara. *Kedua* dalam konteks politik, 'Buton' berarti 'Kabupaten Buton', yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan terdiri atas bagian selatan Pulau Muna, Kepulauan Tukang Besi, Pulau Kabaena, beberapa pulau kecil, dan sebagian semenanjung Sulawesi Tenggara. *Ketiga* dalam konteks kesultanan, 'Buton' bisa digunakan untuk menyebut orang-orang dari daerah Buton, termasuk orang dari Kabupaten Muna (Palmer, 2004).

Di Kota Buton, dulu pernah berdiri sebuah kerajaan atau kesultanan yang bernama Buton atau Wolio. Sebagai sebuah negara, Buton memiliki sistem pemerintahan dengan bentuk sebuah kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-15, yang didirikan oleh pendatang yang berasal dari Johor. Pada perkembangannya, sekitar abad ke-16 dengan masuknya ajaran agama Islam, status kerajaan berubah menjadi kesultanan. Kesultanan ini pun bisa bertahan selama 400 tahun, dan pada abad ke-20 (tahun 1960) berakhir setelah Sultan Laode Muhammad Falihi wafat (Zahari 1977, Yunus 1995, Zuhdi 2010, Tahara, 2014).

Selama ini, studi-studi tentang Buton banyak dilakukan berdasarkan catatan penjelajah dan pegawai pemerintah Belanda, misalnya Ligvoet (1878) sampai ke Van Den Berg (1937, 1939, 1940). Mereka bercerita tentang banyak hal mulai dari ritual, konsepsi kesultanan serta masyarakatnya, hingga catatan tentang kejadian-kejadian penting yang ada di Buton. Ligvoet dan Berg adalah perwakilan pemerintah Belanda yang ditugaskan di Buton dan bertugas untuk merekam kejadian-kejadian penting seperti pelantikan sultan serta situasi keamanan di wilayah itu. Mereka juga mencatat sejumlah catatan penjelajah sebelumnya yang pernah singgah ke Buton seperti Jan Pieterszoon Coen,² Appolonius Scotte³ dll.

²Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) dikenal sebagai orang Belanda yang menemukan jalur perdagangan ke Asia Timur. Ia menjadi Gubernur Jenderal VOC ke-4 yang berkedudukan di kota yang didirikannya yaitu Batavia (Jakarta) pada tahun 1617. Meskipun terlahir dari keluarga penganut Calvinist yang taat, Coen justru dikenal

Sebagai pegawai pemerintah kolonial, catatan Ligvoet dan Berg penuh nuansa penaklukan yang dalam istilah Edward Said (1985), penuh bias etnosentrik yang memahami kebudayaan Buton dalam perspektif kebudayaan barat. Akibatnya, sering terjadi perbedaan konsepsi antara para penulis tersebut dengan warga lokal--yang sayangnya suara mereka harus menjadi suara yang lirih dan tidak senyaring para penulis tersebut.

Dalam aspek politik eksternal posisi Buton sebagai kerajaan di nusantara yang berada di kawasan timur dalam ketegangan adalah posisi yang menjadi tarik menarik kekuatan Gowa dan Ternate. Ekspansi kedua kerajaan besar di bagian timur Nusantara itulah menjadikan kondisi Buton seperti yang digambarkan Schoorl (1985) seperti "shuttle cock" yang dipukul ulang alik, sesekali ke Gowa dan kali yang lain ke Ternate dalam periode yang lama. Secara jelas, bisa dilihat:

....."*Dalam persetujuannya yang pertama dengan Buton pada 1613, VOC membujuknya supaya jangan melakukan kegiatan bermusuhan dengan raja Buton atau terhadap warganya yang manapun (Corpus Diplomaticum 1907:105). Sejak saat itu hingga 1667, Kerajaan Buton serupa bola bulu tangkis (shuttle cock) dalam suatu pertandingan antara Makassar, Ternate, dan VOC*⁴"
(cetak tebal oleh penulis)

Tradisi lisan banyak mengisahkan bagaimana Buton senantiasa berada pada tarik-menarik dari dua kekuatan tersebut. Sikap ekspansi Gowa --yang ditunjang dengan armada persenjataan yang perkasa-- untuk menguasai kawasan timur menjadi ancaman bagi banyak bangsa termasuk Buton. Di sisi

karena tindakannya yang membantai ratusan penduduk Pulau Banda pada tahun 1621. Sumber: Encarta Encyclopedia 2006

³Seorang kapten yang memimpin armada Belanda (VOC) yang pertama datang di Buton pada tahun 1613. Ia mengadakan perjanjian dengan Sultan Buton ke-4 Dayanu Ikhsanuddin untuk mengadakan hubungan kerjasama di bidang pertahanan, ekonomi, dan perdagangan.

⁴Lihat Shoorl (1994) "*Power, ideology, and change in the early State of Buton*" dalam GJ Schutte (ed), *State and Trade in the Indonesian Archipelago*, hlm 17-57, Leiden

lain, banyaknya bajak laut yang berasal dari Tobelo (Ternate) yang menguasai perairan kawasan timur juga telah menjadi kekhawatiran yang harus segera diatasi. Dalam sejumlah tradisi lokal dinyatakan: "*Ane akowii ngalu bhara, tajagaka Gowa, ane akowii ngalu timbu, tajagaka Taranate*" (Kalau tiba musim barat, kita bersiap-siap menghadapi Gowa, dan kalau tiba musim timur, kita bersiap-siap menghadapi Ternate). Zuhdi (2010) menyebutkan kondisi Buton dengan metafora perahu, yang juga dapat berarti kondisi sesungguhnya, "Barata Buton" terombang ambing tiada menentu. Ke arah haluan (*rope*) Buton menghadapi ancaman Gowa sedangkan ke arah buritan (*wana*) harus berhadapan dengan ancaman Ternate. Dalam ketegangan terus menerus itulah, kehadiran VOC yang "membebaskan" Buton dari ancaman bahkan serangan armada kuat Gowa beberapa kali dilakukan dalam dekade pertengahan abad ke-17.

Sumber pustaka yang kaya, baik dari sarjana asing maupun lokal, hingga kini belum banyak dimanfaatkan untuk menuliskan satu etnografi yang kaya dan sangat lengkap mengenai Buton. Padahal, saya berkeyakinan studi tentang Buton sangat penting dilakukan sebab bisa menjadi pintu gerbang untuk menjelaskan bagaimana situasi di Indonesia timur, yang dalam hal ini menjadi lokasi persebaran migran Buton sejak beberapa abad silam. Tiadanya etnografi yang lengkap ini menjadi catatan tersendiri bagi peneliti yang datang belakangan. Sayangnya, hingga kini belum ada satu upaya sistematis untuk menyusun etnografi tersebut.

Catatan paling banyak tentang Buton justru dilahirkan para sejarawan. Padahal, catatan sejarawan selalu menempatkan Buton dalam posisi yang "kalah". Zuhdi (2010) mengatakan: sejarah Buton adalah sejarah yang terkalahkan.⁵ Sebab selama ini, penafsiran sejarah Buton kerap dilihat hanya berdasarkan cara pandang pemilik sejarah di Nusantara seperti Bugis, Makassar, maupun Ternate sehingga keberadaannya seakan diabaikan. Padahal Sahlins (1985: 75) mengatakan, perbedaan waktu dan tempat akan mereflesi-

kan perbedaan sejarah juga.⁶ Semua tempat memiliki sejarahnya masing-masing sebab sejarah tumbuh sebagai bagian dari kebudayaan.

Jika penafsiran Sahlins (1985: 78) digunakan untuk melihat konteks ini, sejarah Buton masih dilihat sebagai sejarah pulau-pulau yang terabaikan (*history of neglected islands*) yang dianggap tidak penting dalam peta sejarah nasional kita. Akibatnya, orang Buton tidak banyak bersuara atau didengarkan suaranya sebab selalu dilihat dengan cara pandang kebudayaan dominan.

Wilayah Kesultanan Buton meliputi Pulau Buton, Pulau Muna, dan pulau-pulau sekitarnya seperti Pulau Kabaena, dan Kepulauan Wakatobi (Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko) serta wilayah Poleang dan Rumbia di Zajirah Sulawesi Tenggara, Pulau Selayar yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Maluku. Pusat pemerintahannya terletak di pesisir barat bagian selatan Pulau Buton tepat dalam seputaran Kota Bau-Bau berkedudukan di Wolio atau lebih dikenal dengan nama Keraton Buton. Pada masa pendudukan pemerintahan Kolonial Belanda, wilayah ini masuk pada wilayah Afdeling Buton dan Laiwoi yang terdiri dari Onderafdeling Buton, Onderafdeling Muna, Onderafdeling Laiwoi, sedangkan Onderafdeling Kolaka berada dalam wilayah Afdelling Luwu.

Perubahan yang menonjol terjadi ketika Buton menjadi ibukota Afdeeling Sulawesi Timur pada tahun 1911. Selanjutnya, pada tahun 1915 Afdeling Buton dan Afdeling Laiwui (Kendari) digabungkan dengan Bungku dan Mori yang dipusatkan di Buton. Dampak langsung kebijakan ini adalah pembangunan dan perbaikan fasilitas kota berupa sarana pelabuhan dan jaringan jalan. Selain itu, pendirian asrama militer dan perumahan, air bersih, telepon, sekolah, serta fasilitas

⁵ Sahlins mengatakan, "*The different cultural orders have their own modes of historical actions, consciousness, and determinations – their own historical practice. Other times, other costumes, and according to otherness of the custom, the distinctive anthropology that is needed to understand any given human course.*" Selengkapnya, lihat Sahlins, Marshall (1985) *Island of History*. Chicago & London: The University of Chicago Press.

⁶ Zuhdi, Susanto (2010) *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Wana Labu Rope*, Jakarta, Raja Grafindo

transportasi darat. Semua itu merupakan bagian dari politik ekonomi Belanda, karena pada kenyataannya Pemerintah Hindia Belanda mengambil keuntungan dari semua fasilitas yang disediakan itu dalam bentuk pajak dan tenaga kerja (Rabani, 2004).

Penguasaan wilayah Sulawesi Tenggara oleh pemerintah Belanda secara ekonomi ditandai dengan proses produksi tambang aspal secara resmi pada tahun 1924, pembangunan dan pelebaran jalan ke daerah-daerah yang mempunyai hasil ekonomi penting seperti perkebunan kelapa dan daerah pedalaman yang mempunyai hasil hutan rotan dan damar. Pembukaan pengolahan kayu jati di Raha dan pembukaan jaringan jalan ke Kendari. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952, Sulawesi Tenggara melebur menjadi satu kabupaten yaitu Kabupaten Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kota Bau-Bau Buton. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959, wilayah tersebut dimekarkan menjadi empat Daerah Tingkat II yang terdiri dari Daerah Tingkat II Buton dengan Ibukotanya Bau-Bau, Daerah Tingkat II Kendari dengan Ibukotanya Kendari, Daerah Tingkat II Kolaka dengan ibukotanya Kolaka dan Daerah Tingkat II Muna dengan Ibukotanya Raha (Rabani, 2010). Keempat Daerah Tingkat II ini merupakan kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada masa pendudukan Jepang masa revolusi dan gejolak daerah tahun 1950-an, mendorong keluarnya orang-orang Buton di daerah lain. Masa yang kelam bagi orang Buton yakni pada masa tragedi tahun 1965, Buton terkena imbas yang menyakitkan terutama stigma negatif yang dituduh sebagai basis PKI (Darmawan, 2009).

Baubau Sebagai Aktifitas Perekonomian Kota Maritim

Buton diklasifikasi sebagai wilayah kepulauan (perairan) dengan Pelabuhan Baubau merupakan tempat yang indah. Hal ini seperti diungkapkan oleh J.P. Coen dalam suratnya kepada Bewindhebber di Banten pada 1614 perihal komentarnya mengenai pelabuhan alam Baubau, ketika ia berkunjung ke Baubau pada 1613. Dalam suratnya Coen menulis "*Hier is*

een zeer schooner reede en de baye" (disini terdapat suatu teluk yang sangat indah). Posisi pelabuhan ini sangat memadai bagi persinggahan perahu dan kapal layar dari barat ke timur dan sebaliknya. Pelabuhan Baubau terletak di bagian barat Pulau Buton serta menghadap ke Pulau Muna, dengan kelebihan terlindung dari hempasan angin musim barat maupun timur. Baubau merupakan pelabuhan (kota pantai) yang paling dekat dengan ibu kota kerajaan. Kota ini berada di tepian sungai Buton yang berfungsi untuk menghubungkan ke wilayah pedalaman (Syakir Mahid dkk, 2012).

Wilayah Kota Baubau pada masa kesultanan merupakan salah satu dari dua *kadie inunca* (bagian dalam) selain Sorawolio. Wilayah ini dipimpin oleh Lakina Baubau yang letaknya sepanjang wilayah pesisir dari Kotalukuna hingga Kotamara. Secara etimologi kata "Baubau" berasal dari dua perspektif. *Pertama*, berdasarkan konsepsi lokal (orang Buton) yang berasal dari kata "bhaau" yang berarti baru. Hal ini didasari atas sebuah wilayah baru yang cukup ramai setelah wilayah Wolio (Keraton). *Kedua*, berdasarkan konsepsi orang luar yang berasal dari Bahasa Melayu yakni bau yang berarti aroma hasil penciuman. Kondisi ini didasari karena wilayah pelabuhan, jembatan batu, dan pasar sungguh menghasilkan bau yang kurang sedap.

Baubau saat itu menjadi pusat perdagangan disamping pusat sejarah dan kebudayaan Buton. Posisi pelabuhan Baubau sebagai pusat pengumpul (*collecting center*) yang memperoleh pasokan komoditas tertentu dari pelabuhan-pelabuhan berukuran kecil. Kondisi ini dicirikan oleh, (1) pelabuhan alam yang baik, (2) tempat persinggahan yang dilengkapi dengan bahan pangan dan sebagai pasar lokal, (3) tempat yang baik dan memiliki pedalaman yang kaya, dan (4) menjadi emporia besar di kawasannya dan merupakan tempat perakitan barang-barang yang berasal dari pelabuhan-pelabuhan berukuran kecil. Pelabuhan-pelabuhan kecil bagi Baubau adalah pulau-pulau sekitar Muna yang menghasilkan jati, Kabaena yang memproduksi beras, Kaledupa yang memproduksi alat-alat dari besi, dan dari pedalaman Pulau Buton menghasilkan jagung

dan ubi-ubian, serta wilayah pantai di Sulawesi Tenggara yang memiliki kekayaan laut.

Letak Baubau sebagai kota pesisir berkembang seiring dengan perkembangan dan tuntutan pasar yang menghendaki adanya mobilitas tinggi. Perluasan infrastruktur kota pada 1900-an sampai akhir perkembangan masa pemerintahan Hindia Belanda di Buton ke daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber ekonomi tinggi di pasar internasional seperti aspal di Pasarwajo dan Banabungi, sedangkan di Muna eksploitasi jati digunakan untuk kepentingan ekonominya.

Posisi strategis Baubau menarik minat suku-suku perantau dan pedagang yang berasal dari Buton dan Makassar yang sangat mendukung pertumbuhan kota. Diaspora dan kebutuhan akan tempat tinggal dalam kota serta pertukaran barang dan jasa menjadikan Baubau cepat berkembang karena mereka intensif berinteraksi di pasar. Pemukiman mereka tersebar dalam kota seperti Kampung Bone, Wajo, Wolio, Tomba, dan Wale. Pemukiman tersebut tidak jauh dari pasar Kota Baubau yang saat itu dikenal dengan jembatan batu. Pasar ini adalah pasar pertama yang ramai di Kota Baubau. Kemudian pada masa Hindia Belanda dibangun pasar yang saat ini menjadi Gedung Bank Negara Indonesia 46 Cabang Baubau dekat Jembatan Gantung.

Infrastruktur dalam kota yang merupakan peninggalan kolonial dan sekolah Cina (arsitektur kolonial) hingga saat ini masih terlihat. Perumahan yang diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Buton, yang rumah dinas bupati/walikota dan beberapa rumah dinas lainnya. Kemudian pada tahun 1920-an Pemerintah Hindia Belanda mendirikan berbagai fasilitas kota seperti gudang, rumah sakit umum, rumah sakit lepra, sekolah dan penjara. Selain sekolah Cina yang bangunannya dijadikan sebagai kantor pelayanan pajak dinas pendapatan Kota Baubau dan beberapa sekolah lainnya.

Dinamika politik yang dominan sangat mempengaruhi perkembangan dan perluasan Kota Baubau. Kota ini sangat berkembang ketika masih berada dalam kontrol kekuasaan Belanda. Seiring masuk pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan, maka Kota Baubau mengalami kemunduran. Lemahnya kontrol

dan kekuasaan sultan waktu itu, serta banyaknya konflik internal sangat berpengaruh terhadap lajunya pertumbuhan kota. Hanya saja di sisi politik, kota menjadi lebih hidup dan bergairah demokrasi. Tokoh-tokoh lokal muncul untuk merespon perubahan situasi yang diwarnai dengan kebebasan termasuk mempertanyakan kelangsungan dan pergantian kekuasaan untuk mengontrol masyarakatnya pada tingkat lokal.

Sebelum pemilu 1955 Baubau adalah ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1952. Adapun beberapa kewenangan yang dimiliki adalah mengurus hal-hal, sebagai berikut: (1) urusan umum (tata usaha) sendiri, (2) urusan pemerintahan umum, (3) urusan pertanian, perikanan, dan kehutanan, (4) urusan pengairan, jalan, dan jembatan, (5) urusan ekonomi dan lainnya seperti kehewanian, (6) urusan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, serta (7) urusan kesehatan masyarakat. Sedangkan partai politik yang tercatat dalam pemilu tahun 1955 adalah Masyumi, PNI, PSII, PSI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Buruh, dan Permai. Anggota partai politik kebanyakan dari pegawai negeri, pegawai daerah, jawatan buruh, guru sekolah rakyat, kepala distrik dan kepala kampung. Partai yang banyak diminati adalah Masyumi dan PNI karena tokoh-tokohnya tidak ada yang buta huruf.

Kota Buton: Identitas dan Transformasi Nilai-Nilai Budaya

Banyak yang beranggapan kebudayaan Buton adalah satuan yang tunggal, misalnya memiliki bahasa serta adat istiadat yang sama di sepanjang bekas wilayah kesultanan. Mereka terkadang melihat Buton seperti halnya Jawa yang punya bahasa yang sama, ataupun Bugis yang juga memiliki bahasa yang sama di ujung selatan Pulau Sulawesi. Di kedua kebudayaan ini, walaupun ada perbedaan bahasa, biasanya hanya berupa dialek sehingga masing-masing masih bisa saling memahami jika berkomunikasi dengan bahasa daerah. Namun di Tanah Buton justru sungguh berbeda.

Ketika orang yang baru pertama mengunjungi Buton, mungkin akan terkejut

menyaksikan betapa beragamnya kebudayaan, adat-istiadat, serta bahasa yang digunakan. Ketika penganut satu bahasa berbincang dengan penganut bahasa lainnya dalam bahasa masing-masing, maka tidak terbangun kesepahaman, meskipun ada kosa kata yang sama. Ini kian menegaskan fakta bahwa masyarakat Buton adalah masyarakat yang heterogen, namun bisa hidup bersama sebagai satu bangsa. Satu hal yang perlu diapresiasi adalah persoalan keragaman bahasa itu tidak lantas membuat warga kehilangan kontak komunikasi satu sama lain, sebab Bahasa Wolio--yang digunakan di sekitar Keraton dan penyelenggaraan pemerin-tahan--kemudian dijadikan sebagai bahasa pemersatu yang selalu dianggap sebagai Bahasa Buton.

Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa Buton memiliki karakteristik yang pluralisme yang membutuhkan kebhinekaan sebagai perekat. Buton adalah sebuah etnisitas yang merupakan wujud identitas yang didalamnya mengandung nilai yang sangat kompleks. Kekhawatiran yang muncul saat ini adalah bagaimana proses penanaman nilai-nilai kepada generasi. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Buton kaya akan nilai-nilai yang diwa-riskan oleh Kesultanan Buton sejak ratusan tahun lalu. Nilai itu masih terjaga dengan berhamburannya situs-situs dan lembaga/pra-nata yang menjadikan nilai tersebut operasional dalam individu.

Dengan mengembalikan nama Kota Buton sebagai pengganti Kota Baubau ini menjadi benteng bagi nilai-nilai identitas masa lalu untuk masa depan. Nilai-nilai itu mengand-ung dua dimensi. **Pertama**, identitas sebagai individu/warga Buton untuk sebuah komoditas politik dalam kehidupan bernegara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan **kedua**, identitasnya sebagai warga dari sebuah komunitas budaya yang disebut *nation* Buton yang sudah ada sejak masa kerajaan/kesultanan. Untuk menjadi war-ga dari komunitas politik (organisasi negara), ia harus mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku, serta undang-undang yang mengat-ur hak dan kewajiban sebagai warga.

Di pihak lain, ikatan sebagai warga sebuah *nation* dalam sebuah organisasi yang bertopang pada solidaritas kebangsaan, *nation* Buton sebagai sebuah identitas merupakan sebuah kesatuan solidaritas yang anggotanya berasal

dari *nation-nation* yang berasal dari sub-sub etnik (wilayah *kadie*) yang telah ratusan tahun tertanam nilai-nilai Ke-Buton-an.

Identitas yang dilekatkan pada ideologi terhubung dengan faham yang biasanya di bawah kontrol suatu negara untuk menjalankan hubungan diplomasi dengan bangsa-bangsa lain. Identitas dalam konteks ini sering digolongkan sebagai identitas bangsa, hasil konstruksi dari berbagai kelompok identitas etnis. J. Jones (1972) menguraikan etnis atau kelompok etnis adalah sebuah himpunan manusia yang dipersatukan oleh suatu kesadaran atas kesamaan sebuah kultur atau subkultur, atau karena kesamaan ras, agama, asal usul bangsa bahkan peran dan fungsi tertentu. Identitas yang dikaitkan pada agama kadang kala dihubungkan dengan identitas nasional. Banyak negara menjadikan agama disamping kultur sebagai pusat identitas nasionalnya. Negara Malaysia misalnya, memiliki tiga pilar yang dianggap sebagai pusat identitas nasional, yakni bahasa (bahasa atau negara melayu), agama (agama atau Islam), dan raja (kerajaan), ketiganya sangat berhubungan dengan kaum mayoritas. Ini memungkinkan bagi masyarakat Buton karena memiliki tiga pilar yakni, *nation*, agama, dan nilai budaya sebagai spirit dan identitas masa lalu untuk masa depan.

Perkembangan konsep identitas tidak hanya melulu dikaitkan dengan etnisitas, bahasa, ideologi, adat-istiadat dan agama.tetapi juga pada tempat (ruang) dan penamaan kota. Tata ruang dan lingkungan yang dibangun ini dapat dihubungkan dengan cerminan masyarakat di dalamnya. Kota Buton misalnya memiliki ruang kota yang dibangun pada masa lalu karena adanya kegiatan kemaritiman/perdagangan, melahirkan identitas masyarakat mari-tim dan masyarakat yang heterogen berkembang hingga sekarang.

Sebagai sebuah transformasi nilai-nilai budaya masa Kesultanan Buton, wacana ten-tang pemilihan nama antara Wolio, Baubau, dan Buton. Nama Wolio menjadi pilihan karena transformasi nilai berbasis identitas sub etnik yang mendiami pusat kesultanan dan kelompok penguasa era Kesultanan Buton (Baca: *Kaomu* dan *Walaka*). Kemudian Baubau merupakan wilayah pusat perekonomian yang merupakan cikal bakal lahirnya sebuah kota yang saat ini kita

kenal dengan dengan Kota Baubau. Sedangkan Buton merupakan transformasi atas pengembalian kebesaran nama Kesultanan Buton dan menjadi perekat identitas ke-Buton-an yang saat ini secara administrasi kewilayah terbagi atas Buton, Baubau, Buton Selatan, Buton Utara, Bombana dan Buton Tengah.

PENUTUP

Kota **Wolio**, **Buton**, dan **Baubau** merupakan wilayah yang memiliki kesejarahan dalam peradaban masyarakat di Jazirah bekas Kesultanan Buton. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan nilai-nilai budaya seiring dengan perkembangan wilayah sejak masa kesultanan hingga saat ini. Kota Wolio erat kaitannya dengan centrum peradaban ketatanegaraan karena wilayah ini menjadi lokus utama dalam Kerajaan/Kesultanan Buton. Buton sebagai identitas yang membangun *nation* dengan keberagaman sub etnik (*kadie*) yang melingkupi totalitas hidup bagi masyarakat eks Kesultanan Buton yang berfungsi sebagai transformasi nilai masa lalu untuk masa depan. Sedangkan Baubau memiliki peran penting sebagai aktivitas perekonomian yang menjadi ciri Buton sebagai sebuah bangsa maritim.

Sebagai penutup, saya hanya menawar perubahan nama Kota Baubau menjadi Kota Buton sebagai identitas dan transformasi nilai-nilai kebesaran Kerajaan/Kesultanan Buton. Namun demikian, nama Baubau tidak serta merta dilupakan karena keberadaan kota Bau-bau menjadi momentum dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pada kesempatan ini, mengingat wilayah pesisir pelabuhan dan pasar (baca: wilayah Kecamatan Wolio) memungkinkan untuk dikembalikan sebagai Kecamatan Baubau. Sedangkan Kecamatan Wolio bergeser posisi menempati wilayah Kecamatan Murhum, dan Kecamatan Betoambari diubah menjadi Kecamatan Lipu Morikana. Penghapusan kedua nama kecamatan ini (baca: Murhum dan Betoambari) dengan pertimbangan bahwa sebuah wilayah kecamatan sebaiknya mengacu pada "*presedent of consituent*" yang pada lokasi yang memiliki nilai historis bukan nama seorang raja/sultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, E.J. van den 1937 "De viering van den raraja hadji in de kota Wolio (Boeton)." *Tijd.*, LXXVII, 650-660.
- 1939 "Adatgebruiken in verband met de sultansinstallatie in Boeton." *Tijd.*, LXXIX, 469-528.
- 1940 "Een rijsfeest in Lawela." *Tijd.*, LXXX, 530-543.
- Darmawan, Yusran, 2008. *Antropologi, Ingatan, dan Kesejarahan (Orang Buton Memaknai Tragedi PKI 1969)*. Tesis Program Pascasarjana Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok.
- Fox, JJ, 1988, *Origin, Descent and Precedence in the Study of Austronesian Societies*. Leiden: Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Universitas Leiden.
- Geertz, C, 1992. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Ligtvoet, A. 1878 "Beschrijving en geschiedenis van Boeton." *Bijd.*, XXVI.
- Palmer, Blair, 2004. *Migrasi dan Identitas: Perantau Buton yang Kembali ke Buton Setelah Konflik Maluku 1999-2002*, Jurnal Antropologi Indonesia Th. XXVIII, No. 74.
- Rabani, Laode, 2010. *Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rudyansjah, Tony, 1997, *Kaomu, Walaka, dan Papara: Satu Kajian Mengenai Struktur Sosial dan Ideologi Kekuasaan di Kesultanan Wolio*, Jurnal Antropologi Indonesia No. 52.
- Rudyansjah, Tony, 2009. *Kekuasaan, Sejarah, dan Tindakan; Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahlins, Marshall, 1985. *Islands of History*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Said, Edward W, 1985 *Orientalism*, New York: Perigrine Books.

- Schrool JW, 2003. *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton*. Jakarta, Penerbit Djambatan- KITLV.
- Spradley, J.P.1980. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Syakir Mahid, dkk, 2012. *Sejarah Kerajaan Bungku*, Yogyakarta, Penerbit Ombak
- Tahara, Tasrifin, 2014. *Melawan Stereotip: Etnografi, Reproduksi Identitas, dan Dinamika Masyarakat Katobengke Buton yang Terabaikan*. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
- Tirtosudarmo, Riwanto, 2008. Sejarah Untuk Masa Depan: Dari Kesultanan Buton ke Provinsi Buton Raya? Dalam *Menyibak Kabut Keraton Buton*, Yusran Darmawan (editor), Respect – Pemerintah Kota Bau-Bau.
- Tsing, Anna Lowenhaupt, 1993 *In The Realm of the Diamond Queen, Marginality in an Out the Way Place*, Pricenton University Press.
- Winn, Phillip, 2008 Butonese in the Banda Islands: Departure, Mobility, and Identification, in *Horizon of Home: Nation, Gender, and Migrancy in island Southeast Asia*, Edited by Penelope Graham, Monash Asia Institute, Clayton.
- Yunus, A.R. 1995 *Posisi Tasawuf Dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton Pada Abad ke-19, Seri INIS; jil 24*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies.
- Zahari, Mulku 1977, *Sejarah dan Adat Fiy darul Butuuni*, Koleksi Pribadi Belum dipublikasikan.
- Zuhdi, Susanto, 2010, Sejarah Buton yang Terabaikan: *Labu Rope Labu Wana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada